

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN 1 LASUSUA (MODEL GOGGIN)

Qhanita Wulandari Arif¹, Nurul Imana², Nuryanti Mustari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

wul4ndariariff@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) policy at SDN 1 Lasusua using Goggin's Policy Implementation Model. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving the principal, BOS treasurer, and teachers. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the content of the BOS policy has been well understood by policy implementers at the school level. Policy communication as an intervening variable has been carried out through socialization activities and school meetings; however, policy understanding has not been evenly distributed among all implementers. The implementation of BOS funds has positively contributed to school operational activities and the learning process. The implementation environment and implementers' capacity generally support policy execution, although administrative constraints, limitations of the online reporting system, and delays in fund disbursement remain challenges. This study confirms that policy communication plays a strategic role in linking policy content and implementation outcomes and serves as a key factor in enhancing the effectiveness of BOS policy implementation in primary schools.

Keywords: *policy implementation, School Operational Assistance (BOS), Goggin model, policy communication, primary school*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Lasusua dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Goggin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, bendahara Dana BOS, serta guru. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan Dana BOS telah dipahami dengan cukup baik oleh pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Komunikasi kebijakan sebagai variabel intervening telah berjalan melalui sosialisasi dan rapat sekolah, namun pemahaman kebijakan belum sepenuhnya merata di seluruh pelaksana. Implementasi Dana BOS memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional sekolah dan proses pembelajaran. Lingkungan implementasi dan kapasitas pelaksana pada umumnya mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan sistem pelaporan daring, dan keterlambatan pencairan dana. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran strategis dalam menjembatani isi

kebijakan dan hasil implementasi, serta menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Dana BOS di tingkat sekolah dasar.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Dana BOS, Model Goggin, komunikasi kebijakan, sekolah dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas (Dwi et al., 2024). Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tersebut secara merata, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai instrumen pembiayaan pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia (Nasrullah, 2023). Program BOS dirancang untuk meringankan beban biaya operasional sekolah serta meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar tanpa diskriminasi, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi kebijakan BOS sering kali menjadi fokus kajian akademik karena kompleksitas pelaksanaannya di tingkat sekolah (Nurman et al., 2024). Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa pengelolaan dan implementasi BOS di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk tata kelola, transparansi dan

keterlibatan pemangku kepentingan (Heriman et al., 2024). Studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa meskipun secara umum implementasi dana BOS sudah berjalan sesuai panduan, tetap terdapat hambatan yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan di sekolah.

Keberhasilan implementasi BOS tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan sekolah dalam mengelola, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut (Romadhotin et al., 2024). Misalnya, penelitian di beberapa provinsi mengungkapkan bahwa tata kelola BOS yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas dan proses pembelajaran. Namun, literatur juga mencatat masalah seperti rendahnya pemahaman aturan serta keterbatasan sumber daya manusia di sekolah dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini (Wijanarko et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, kajian implementasi kebijakan BOS memerlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat secara sistematis dan empiris. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Model Implementasi Kebijakan Goggin, yang memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses ilmiah dengan hubungan antara variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Model ini menempatkan isi kebijakan sebagai variabel independen, komunikasi kebijakan sebagai variabel intervening yang berperan sebagai penggerak utama, serta hasil implementasi sebagai variabel dependen yang mencerminkan keberhasilan kebijakan (Rahardian, 2024).

Model Goggin juga menekankan pentingnya lingkungan implementasi dan kapasitas pelaksana dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan organisasi sekolah, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan, berinteraksi melalui proses komunikasi kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi pemahaman kebijakan, sehingga menghambat

pencapaian tujuan kebijakan BOS. Oleh karena itu, Model Goggin memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai bagaimana kebijakan BOS diimplementasikan secara nyata di tingkat sekolah (Monica, 2021).

SDN 1 Lasusua dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar negeri di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Sebagai sekolah di daerah luar kota besar, SDN 1 Lasusua memiliki karakteristik pengelolaan dana BOS yang menarik untuk dikaji, terutama terkait bagaimana kebijakan nasional diinternalisasi di tingkat lokal dan tantangan yang dihadapi pelaksana di lapangan.

Dengan melihat fenomena tersebut, ada kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan BOS diimplementasikan di SDN 1 Lasusua berdasarkan Model Goggin serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam rangka

meningkatkan efektivitas pelaksanaan BOS di sekolah dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Lasusua berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Goggin. Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selama kurang lebih dua minggu. Data diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu kepala sekolah, bendahara Dana BOS, dan guru yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Sumber data terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi sekolah, petunjuk teknis Dana BOS, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara

kualitatif interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dianalisis berdasarkan variabel dalam Model Implementasi Kebijakan Goggin, yaitu isi kebijakan, komunikasi kebijakan, lingkungan implementasi dan kapasitas pelaksana, serta hasil implementasi kebijakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Isi Kebijakan Dana BOS (Variabel Independen)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dipahami secara cukup baik oleh para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Pemahaman tersebut mencakup tujuan kebijakan, sasaran penerima, serta ketentuan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Dana BOS. Kejelasan regulasi menjadi pedoman utama bagi sekolah dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas penggunaan anggaran operasional.

Isi kebijakan Dana BOS dipersepsikan sebagai instrumen pemerintah yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan operasional sekolah dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan adanya ketentuan yang relatif jelas dan terstruktur, pelaksana kebijakan memiliki acuan normatif dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Dalam perspektif Model Implementasi Kebijakan Goggin, isi kebijakan berperan sebagai variabel independen yang menentukan arah dan kualitas implementasi kebijakan. Kejelasan tujuan dan substansi kebijakan Dana BOS di SDN 1 Lasusua menunjukkan bahwa kebijakan telah dirumuskan secara operasional sehingga dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana kebijakan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kejelasan isi kebijakan berkontribusi positif terhadap konsistensi implementasi Dana BOS. Kebijakan yang dipahami dengan baik akan meminimalkan

terjadinya kesalahan interpretasi dan penyimpangan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, isi kebijakan Dana BOS berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendorong tercapainya tujuan kebijakan di tingkat sekolah.

2. Komunikasi Kebijakan Dana BOS (Variabel Intervening)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Dana BOS di SDN 1 Lasusua dilakukan melalui mekanisme sosialisasi dari Dinas Pendidikan, rapat internal sekolah, serta penyampaian dokumen petunjuk teknis. Informasi kebijakan disampaikan secara berjenjang dari pemerintah kepada kepala sekolah dan bendahara, kemudian diteruskan kepada guru dan pihak terkait lainnya melalui forum rapat.

Namun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan belum sepenuhnya merata. Meskipun informasi mengenai Dana BOS disampaikan secara terbuka, sebagian pelaksana di tingkat operasional masih mengalami keterbatasan dalam memahami aspek teknis kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan pemahaman antar pelaksana kebijakan.

Dalam Model Goggin, komunikasi kebijakan diposisikan sebagai variabel intervening yang menjembatani isi kebijakan dengan hasil implementasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan pemahaman bersama di antara para pelaksana.

Ketidakterlibatan sebagian pelaksana dalam proses komunikasi kebijakan berpotensi menghambat efektivitas implementasi Dana BOS. Komunikasi yang bersifat administratif dan terpusat dapat menyebabkan pemahaman kebijakan menjadi parsial. Oleh karena itu, penguatan komunikasi kebijakan secara horizontal dan partisipatif menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap tujuan kebijakan.

3. Pelaksana Dana BOS dan Hasil Implementasi (Variabel Dependen)

Pelaksanaan kebijakan Dana BOS di SDN 1 Lasusua dilaksanakan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional sekolah lainnya. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Hasil implementasi Dana BOS dirasakan secara langsung oleh pelaksana dan pengguna kebijakan, khususnya dalam peningkatan ketersediaan fasilitas pembelajaran dan kelancaran proses belajar mengajar. Secara umum, Dana BOS memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sebagai variabel dependen dalam Model Goggin, hasil implementasi merupakan refleksi dari interaksi antara isi kebijakan dan proses komunikasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika kebijakan Dana BOS

selaras dengan kebutuhan sekolah dan dilaksanakan oleh pelaksana yang memahami tujuan kebijakan, maka hasil implementasi cenderung positif.

Keberhasilan implementasi Dana BOS di SDN 1 Lasusua menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan awal. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola kebijakan secara adaptif sesuai dengan konteks sekolah.

4. Lingkungan Implementasi dan Kapasitas Pelaksana

Lingkungan implementasi kebijakan Dana BOS di SDN 1 Lasusua tergolong cukup kondusif. Dukungan dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta orang tua siswa menciptakan iklim kerja sama yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat turut memperkuat legitimasi kebijakan.

Dari sisi kapasitas pelaksana, kepala sekolah dan bendahara

memiliki pemahaman yang memadai terhadap petunjuk teknis Dana BOS. Namun demikian, masih ditemukan kendala administratif, seperti kesulitan penyediaan bukti transaksi, keterbatasan jaringan internet dalam pelaporan daring, serta keterlambatan pencairan dana.

Dalam Model Implementasi Kebijakan Goggin, lingkungan implementasi dan kapasitas pelaksana merupakan faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat komitmen pelaksana, sedangkan kapasitas pelaksana menentukan kemampuan teknis dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun lingkungan implementasi relatif mendukung, keterbatasan sistem pendukung dan administrasi masih menjadi tantangan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aktor pelaksana, tetapi juga pada kesiapan sistem dan infrastruktur

yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana dan penyederhanaan mekanisme administrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Dana BOS.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Lasusua pada dasarnya telah berjalan cukup efektif berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Goggin. Dari sisi isi kebijakan, tujuan, sasaran, serta ketentuan penggunaan Dana BOS telah dipahami dengan cukup baik oleh pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Kejelasan substansi kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam mengarahkan proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Komunikasi kebijakan Dana BOS sebagai variabel intervening telah dilaksanakan melalui sosialisasi dari pemerintah dan rapat internal sekolah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas

komunikasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena pemahaman kebijakan belum merata di seluruh unsur pelaksana, khususnya pada level guru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan masih cenderung bersifat administratif dan perlu ditingkatkan agar mampu membangun pemahaman bersama serta keterlibatan yang lebih luas dalam implementasi kebijakan.

Hasil implementasi kebijakan Dana BOS memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional sekolah dan proses pembelajaran. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana, kebutuhan pembelajaran, serta kegiatan operasional sekolah lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa hasil implementasi sebagai variabel dependen merupakan konsekuensi dari adanya kejelasan kebijakan dan proses komunikasi kebijakan yang relatif berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan.

Lingkungan implementasi dan kapasitas pelaksana pada umumnya mendukung pelaksanaan kebijakan Dana BOS di SDN 1 Lasusua. Dukungan internal sekolah dan

masyarakat menciptakan iklim implementasi yang kondusif, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas administratif, hambatan sistem pelaporan daring, dan keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif, peningkatan kapasitas pelaksana melalui pendampingan teknis, serta perbaikan sistem pendukung agar implementasi Dana BOS dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik*. 7, 7094–7100. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4773/3894>
- Heriman, Hartini, S., Wartini, S., Warman, & Mulawarman, W. G. (2024). *Management of Educational Funds Through School Operational Assistance (BOS) in Elementary Schools in Sempaja Subdistrict*. 4(2), 1–9. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjpe/article/view/5763/2966>
- Monica, S. D. (2021). *Analisis Konsep Kebijakan Publik Studi Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. 5(2), 156–166. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/3396/2089>
- Nasrullah, F. (2023). *Educational Policy In The School Operational Assistance Program To Improve The Quality Of Education*. 1(2), 72–84. <https://amandemen.my.id/index.php/i/article/view/34/9>
- Nurman, Zainal, & Ardiansyah. (2024). *The Dynamics Of Theoretical Approaches In Contemporary Public Administration Studies: Critical Analysis And Policy Implications*. 10(2), 123–136. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21508/7768>
- Rahardian, R. (2024). *Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer* (1st ed.). BRIN. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/998/1153/28509>
- Romadhotin, P. A., Trihantoyo, S., & Santoso, G. (2024). *Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tuban*. 03(02), 192–201.

<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1750>

Wijanarko, G. W., Mafruhah, I., Hindrayani, A., & Sabandi, M. (2025). *The Influence of School Operational Assistance (BOS) Funds on Students' Literacy and Numeracy: Evidence from Indonesia*. 8(4), 546–553.
<https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/110399/52311>